

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Apabila kita memperhatikan secara mendalam tatanan masyarakat sebagai inti dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tergambar dengan jelas pola kemasyarakatan yang beraneka ragam. Berpuluh-puluh suku bangsa yang mendiami kepulauan nusantara ini, berada dalam daerah-daerah yang terpisah-pisah oleh lingkungan alam dan budaya. Laut yang luas, gunung yang tinggi, lembah yang dalam dan hutan yang lebat telah memisahkan daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selain kondisi topografi wilayah di atas, budaya yang berbeda antara suku bangsa juga dapat terlihat dari adanya bahasa yang berbeda. Cara hidup dan adat-istiadatnya juga berbeda-beda bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Kenyataan ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna mengadu domba dan memecah belah guna memperoleh keuntungan sendiri. Oleh karena itu dalam keadaan sekarang ini tidak mustahil bahwa dalam kesatuan bangsa yang padu dan mencerminkan keberagaman ini, terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Guna memahami masyarakat yang utuh dan menerapkan multikulturalisme di Indonesia, diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta fungsi multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan-bangunan konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai pengertian yang sama tentang multikulturalisme

sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ide ini. Konsep-konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya, kesamaan dan perbedaan yang sederajat, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keragaman, ungkapan-ungkapan budaya, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lain yang relevan.

Berkaitan dengan konsep multikulturalisme, maka Parsudi Suparlan yang dikutip oleh Anhar Gonggong, (2005:2) mengatakan bahwa:

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan dan kesederajatan. ...Baik perbedaan individu maupun perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme menjadi ucapan keyakinan untuk terwujudnya pluralisme budaya, dan terutama memperjuangkan kesamaan hak dari berbagai golongan minoritas baik secara hukum maupun secara sosial. Dalam perjuangan ini multikulturalisme merupakan acuan yang paling diterima dalam masyarakat yang paling demokratis karena yang diperjuangkan oleh penduduk multikulturalisme adalah sejalan dengan perjuangan para penganut demokrasi.

Multikulturalisme mestinya dipandang sebagai bagian dari kekayaan bangsa ini, ketika multikulturalisme dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap kedamaian maka dengan mudah konflik-konflik sosial dalam ukuran kecil akan terus menerus terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konflik adalah perjuangan individu atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu, kekalahan/kehancuran lawan akan dipandang sebagai keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini selaras dengan Darendorf yang dikutip oleh T Soumokil dkk, (2005:1) yakni: "Kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan yang bukan semata-mata oleh

kepentingan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Marx akan tetapi juga berbagai kepentingan lain”.

Apabila kita menggunakan pendapat Dahrendorf dapat diketahui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak potensi konflik, karena setiap masyarakat akan memiliki kepentingan yang harus dipenuhi dalam pemenuhan tersebut harus mengorbankan orang atau kelompok lain. Upaya pemenuhan kepentingan apabila tidak dilakukan dengan aturan main yang terwujud sebagai hukum, hukum adat atau hukum konvensi-konvensi lainnya akan menimbulkan konflik. Apabila di dalam masyarakat terdapat aturan-aturan main yang disepakati dan dianggap adil yang kemudian dilanggar maka akan membangkitkan kebencian yang mendalam. Pada masyarakat yang majemuk dimana terdapat berbagai suku bangsa, perasaan kebencian pada umumnya akan diawali dengan perasaan-perasaan prasangka serta pandangan stereotip dari suku bangsa terhadap suku bangsa yang lain. Hal ini kalau tidak dengan cepat di perhatikan oleh pemimpin dalam masyarakat dan diselesaikan berdasarkan aturan main yang berlaku dalam lingkup desa maupun lingkup Negara kesatuan, maka konflik sosial akan bermunculan kembali.

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki rasa toleransi dan solidaritas yang tinggi kepada pihak lain yang saling berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai catatan sejarah yang panjang yang menunjukkan kemampuan mereka menjaga harmoni sosial, meskipun juga ada catatan yang menunjukkan pernah terjadi konflik horizontal dalam masyarakat Indonesia.

Di jaman serba canggih ini di Indonesia sedang terjadi Problem sosial yang mengarah pada perubahan sosial. Permasalahan tersebut salah satunya adalah tawuran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti pada akhir-akhir ini terjadi tawuran antarsuku yang terjadi di Timika, padahal tawuran tersebut dipicu oleh kematian Suku Dhani yang diduga menghidap penyakit Ayan/epilepsi. Tetapi Suku Dhani tersebut dianggap diakibatkan karena korban diduga terkena guna-guna dari suku yang lain sehingga Ketua Adat Suku Dhani mengangkat Bendera perang maka terjadilah perang di Timika karena mereka menganggap Nyawa harus dibayar dengan nyawa.

Di Papua hal tersebut sering terjadi, perang antarsuku akan reda apabila kepala adat disana menganjurkan untuk berdamai karena banyak korban yang berjatuhan dan cara perdamaian mereka pun tergolong unik, dengan memakai upacara adat yang bernama 'Upacara Patah Panah'. Hal ini merupakan salah satu bentuk peranan kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat, dimana pemimpin dijadikan sebagai sosok yang terus memberikan nasehat kepada masyarakat.

Permasalahan yang menimbulkan konflik yang dialami oleh suku-suku yang berada di daerah Papua, tidaklah berbeda dengan apa yang sering terjadi di daerah Cibingbin. Maka peranan kepemimpinan dalam masyarakat menjadi sangat mendasar dalam kaitan dengan menghindari meluasnya konflik sosial yang terjadi.

Cibingbin merupakan sebuah desa yang menjadi ibukota kecamatan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Sebagai sebuah desa, Cibingbin terbagi menjadi enam blok atau dusun yaitu; dusun kliwon, dusun pahing, dusun manis,

dusun puhun, dusun pon, dan dusun wage. Desa Cibingbin memiliki tradisi acara hiburan dangdut atau tarlingan saat menyelenggarakan acara pernikahan atau khitanan yang biasanya diadakan setiap bulan Rayagung atau bulan Dzulijah (bulan dalam kalender Hijriah).

Tradisi penyelenggaraan hiburan dangdut atau tarlingan, selain memiliki efek positif yaitu menunjukkan tingkat kemakmuran secara ekonomi dari masyarakat Cibingbin, juga memiliki efek negatif yaitu sering terjadinya tawuran antarpemuda dalam acara tersebut. Lebih parah lagi, efek negatif tradisi tersebut telah menjadi efek bola salju bagi masyarakat Cibingbin. Tawuran karena hal sepele yang terjadi antarpemuda telah berimbas pada tata kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Tradisi hiburan dangdut yang berujung pada tawuran, sebagai contoh terjadi pada bulan Januari 2002. Tawuran tersebut melibatkan dua dusun yaitu dusun pahing dan dusun kliwon. Sejatinya tawuran disebabkan oleh masalah sepele antarpemuda saat berjoged dalam tradisi hiburan dangdut yang diselenggarakan sebuah keluarga yang sedang merayakan acara pernikahan. Seorang pemuda memukul pemuda lainnya ketika sedang menonton hiburan dangdut. Pemukulan tersebut berawal saat seorang pemuda dari dusun pahing yang sedang mengonsumsi minuman keras, meminta uang secara paksa kepada seorang pemuda dari dusun kliwon. Pemuda dusun kliwon itu melawan karena merasa risih. Pemuda dusun kliwon itu langsung memukul pemuda yang sedang mabuk tadi hingga babak belur. Pemuda yang mabuk tersebut tidak menerima

perlakuan tadi sehingga dia memanggil teman-temannya dan mencari pemuda yang memukulnya.

Masalah timbul menjadi semakin larut dan rumit karena pemuda dusun kliwon mengadakan pemukulan atas dirinya ke teman-teman satu dusunnya. Selama beberapa hari, suasana menjadi semakin memanas dan mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat Cibingbin secara keseluruhan khususnya masyarakat dusun pahing dan kliwon. Seluruh masyarakat Cibingbin merasa tidak nyaman karena para pemuda dari kedua dusun tersebut berjaga-jaga di dusunnya masing-masing. Setiap orang yang melintasi dusun mereka akan diberhentikan dan diperiksa identitas dirinya. Masyarakat jadi merasa tidak nyaman dengan *sweeping* identitas diri (pemeriksaan KTP) tersebut.

Akibat tawuran yang hampir setiap hari terjadi, bangunan fisik masyarakat Cibingbin banyak yang rusak terutama bangunan fisik di dua dusun yang sedang berseteru. Selain bangunan fisik, dinding dan atap rumah yang rusak, ditemukan pula beberapa kendaraan roda empat dan roda dua yang dirusak oknum pemuda yang sedang bertikai. Tawuran juga telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat Cibingbin. Pasar Cibingbin yang terletak di antara kedua dusun yang sedang bertikai pun menjadi sepi pembeli. Tawuran antar dua dusun yang bertikai telah merugikan masyarakat Cibingbin secara keseluruhan.

Dalam tawuran tersebut, peran Kepala Desa Cibingbin sebagai “*kambing hitam*” (*Scape goat*) yaitu: seorang pemimpin yang menyadari bahwa dirinya merupakan tempat melemparkan kesalahan/keburukan yang terjadi di dalam

masyarakatnya. Oleh karena itu, dia harus mau dan berani serta turut bertanggung jawab tentang kesalahan orang lain/anggota masyarakatnya.

Jika mencermati ciri-ciri konflik di atas dapat dikatakan bahwa tawuran menempatkan kelompok massa sebagai pelaku tindakan yang agresif dan bersifat merusak yang dipengaruhi oleh insting untuk berkelahi, dan pengalaman hidup sebagai akibat stimulasi lingkungan sosial, dengan kata lain tindakan kekerasan dari individu atau dalam bentuk tindakan massa dapat terhasut oleh lingkungan sosial.

Dalam lingkungan konflik, insting untuk berkelahi sangatlah menonjol, dikarenakan kondisi perkelahian pada saat itu mengharuskan situasi penyerangan dan penyelamatan menjadi yang utama dalam melakukan tindakan. Insting berkelahi yang dimiliki manusia pada akhirnya akan terpicu dalam bentuk tindakan agresi. Konrad Lorenz menyebutkan bahwa agresi yang menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain timbul dari insting berkelahi disertai oleh kekerasan. Ayub Sani Ibrahim, (2002:2) menyatakan: “Agresi adalah setiap bentuk keinginan (*drive-motivation*) yang diarahkan pada tujuan untuk menyakiti atau melukai seseorang. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, dalam berbagai struktur atau sistem kekerasan yang akan menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan”.

Dari apa yang diuraikan di atas, konflik dapat kategorikan sebagai kerusuhan sosial yang melibatkan massa yang lebih banyak yang diakibatkan oleh masalah-masalah sosial yang semakin kentara dikalangan masyarakat. Kerusuhan sosial yang melibatkan massa hingga terjadi konflik, pada saat ini bukan hanya

terjadi di daerah perkotaan saja, dalam hal ini masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, urbanisasi, melainkan juga sudah menjalar kepada masyarakat pedesaan, dimana konflik yang terjadi di daerah pedesaan ini pada dasarnya merupakan sebuah pengingkaran terhadap ciri-ciri yang telah melekat pada masyarakat pedesaan, yang pada umumnya masih terkait pada norma dan adat istiadat yang masih kental.

Berbicara tentang masyarakat pedesaan, tentunya kita dapat membayangkan suasana kehidupan yang rukun, damai serta hidup berdampingan, namun anggapan yang melekat tersebut akan hilang sama sekali tatkala kita mendengar pergesekan yang berbuah konflik di dalamnya. Fenomena ini ada ketika gejolak-gejolak sosial pada masyarakat desa mulai muncul ke permukaan, ini merupakan fakta baru dilapangan mengenai konflik yang ada di daerah pedesaan. Contoh yang mengemuka konflik di wilayah pedesaan diantaranya kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti daerah Banjarnegara, Subang, Indramayu, Cirebon, dan Kuningan serta daerah-daerah lainnya.

Berdasarkan teori, konflik di daerah pedesaan biasanya terjadi pada kalangan petani, karena pada umumnya di daerah pedesaan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya suatu perbedaan pendapat dalam mencapai tujuan yang ingin mereka capai, dengan kata lain perpecahan terjadi karena perbedaan pendapat mengenai tujuan kelompok tidak mencapai konsensus lagi. Selain perbedaan pendapat, kebutuhan dasar dan masuknya ekonomi pasar dan komersialisme pun

menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik, dikarenakan adanya perubahan tatanan kehidupan di daerah pedesaan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Samuel. L. Popkin dalam bukunya *National Reasent* yang penulis kutip dari bukunya Astrid S. Susanto, (1998:17) ia mengemukakan bahwa:

Perlawanan petani merupakan akibat dari terganggunya kebutuhan dasar Petani. Meskipun petani tradisional hidup dalam lingkungan sosial yang erat, tetapi dalam tindakannya selalu terdapat kepentingan pribadi yang dalam hal ini adalah keluarga. Masuknya ekonomi pasar dan komersialisme sebetulnya menguntungkan petani karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tetapi bila perubahan yang terjadi tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan, maka timbul gejolak. Perlawanan petani timbul bukan dalam waktu sekejap, melainkan dari timbunan gejolak-gejolak kecil yang tidak terselesaikan yang makin lama makin membesar.

Bila mencerna pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konflik di daerah pedesaan tidak muncul begitu saja, melainkan timbul dari gejolak-gejolak kecil yang makin lama makin membesar hingga terjadilah suatu aksi massa yang biasa disebut dengan konflik massa, karena yang terlibat bukan hanya individu-individunya lagi tetapi sudah melibatkan massa yang lebih banyak. Oleh karena itu peran dari tokoh masyarakat menjadi salah satu elemen yang sangat berarti, sehingga konflik yang terjadi tidak meluas dalam masyarakat. Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Coser yang dikutip oleh Wawan Darmawan, (2005:370) yakni: “Perlunya peran besar dari para pemimpin yang berkonflik meyakinkan para pengikutnya untuk mengakhiri konflik, sehingga ini akan mengurangi lamanya konflik. Peran tokoh-tokoh, khususnya dari masyarakat untuk memulai rekonsiliasi dan menyerukan agar kekerasan dihentikan, sehingga konflik diharapkan dapat reda dan berakhir“.

Dari landasan pikir di atas, maka yang menjadi pertanyaan; mengapa konflik yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjadi suatu konflik masa yang sangat besar ? Dimanakah peranan kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat, guna mencegah agar konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak berimbas secara besar-besaran, yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri?

Bertolak dari latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Peran Kepemimpinan Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial, dengan judul penulisan:

**“Peran Kepemimpinan Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial”  
(Studi Kasus di Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 1. Secara umum

Secara umum masalah penelitian ini adalah sering terjadinya pertentangan kepentingan dan pertentangan pendapat baik itu antar masyarakat desa Cibingbin maupun antara pemuda yang berada pada desa cibingbin dengan pemuda yang berasal dari luar desa Cibingbin, pertentangan ini melahirkan konflik yang muncul dalam masyarakat, yang semuanya itu berimbas pada makin terpuruknya tatanan kehidupan bermasyarakat yang ajek di Desa Cibingbin.

## 2. Secara khusus

Secara khusus masalah penelitian ini sebagai berikut:

### a. Masalah Peran kepemimpinan masyarakat itu meliputi:

- Pemimpin Formal, yaitu: kepala desa, aparat desa, ketua rukun warga (RK), ketua rukun tetangga.
- Pemimpin informal, yaitu: tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan.
- Peran kepemimpinan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan konflik.

### b. Konflik sosial, meliputi:

- Tawuran
- Pertentangan pendapat dan kepentingan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni bagaimana peran kepemimpinan masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial di Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

Secara Khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui latar belakang terjadinya konflik di Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
- b. Mengetahui peranan para pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan konflik sebagai masalah sosial pada masyarakat Desa Cibingbin.
- c. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian konflik.

d. Mengetahui upaya-upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan konflik, sebagai masalah sosial pada masyarakat Desa Cibingbin.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengungkapkan dan menggambarkan bagaimana peranan pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan konflik sebagai masalah sosial, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang positif terhadap kepentingan Ilmu pengetahuan terutama Ilmu Sosial, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap upaya penyelesaian konflik yang melanda bangsa dan negara pada umumnya yang sering terjadi.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi dan inovasi bagi para pemimpin masyarakat Desa Cibingbin serta masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi terutama yang menyangkut masalah perbedaan pendapat.

## D. Anggapan Dasar

Yang dimaksud anggapan dasar menurut Winarno Soekarno yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, (1983:47) adalah: “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya di terima oleh penyidik”. Pada penelitian ini, sebagai titik tolak berpikir digunakan anggapan dasar sebagai berikut:

- a. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata krlakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. (Soerjono Soekanto, 1990:397)
- b. Konflik masyarakat jika ditinjau dari segi teori konflik menyangkut kepada kelompok kepentingan yang antagonistic, yang di dalamnya terdapat perpecahan kelompok dan kelompok aktual, dimana kedua-duanya mempunyai potensi menjadi kelompok konflik, dan bila kondisi-kondisi struktural, kondisi-kondisi politik dan kondisi sosiala yang tertata dengan baik, maka potensi untuk lahirnya kekerasan fisik diantara kelompok tersebut akan menjadi tampak dan tidak terorganisasi. (K. J. Veeger, 1990:217)
- c. Pada hakekatnya konflik yang mengancam Indonesia menjadi tercabik-cabik hanya karena ekspresi yang paling berbahaya dari budaya kekerasan. Hal ini berarti masyarakat Indonesia betul-betul dalam keadaan sakit. (Franz Magnis-Suseno, 2003:125)
- d. Tokoh masyarakat desa pada umumnya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sikap, tanggapan dan larangan yang timbul darinya akan dianggap sebagai bahan pertimbangan yang utama dalam memutuskan suatu masalah oleh warganya. (Soejono Soekanto, 1982:290)
- e. Kehidupan di desa masih memperlihatkan ciri-ciri paguyuban, dimana bisa kita lihat pada masyarakat yang demikian itu hubungan antara rakyat dengan pemimpin-pemimpin desanya sangat dihargai. (Soerjono Soekanto, 1982:291)

## **E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif melalui penelitian kasus (*Case Study*), dengan menggunakan bentuk penelitian studi kasus tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji masalah konflik yang sering terjadi di Desa Cibingbin, akhir-akhir ini. Misalnya konflik-konflik yang sering terjadi diantaranya konflik antar masyarakat di dalam Desa Cibingbin, konflik antar masyarakat Desa Cibingbin dengan Desa yang lain, juga konflik yang terjadi antara massa calon Kepala Desa yang berlangsung pada tanggal 22-29 Januari 2007, yang disebabkan karena terjadinya kecemburuan dan kesalahan persepsi antara massa calon kepala desa. Faktor-faktor ini, berimbas pada hancurnya tatanan kehidupan bermasyarakat dalam Desa Cibingbin. Berkenaan dengan itu, Suharsimi Arikunto, (1998:131) mengemukakan bahwa: “Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu”.

Mengingat penelitian ini merupakan studi kasus, maka untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dilakukan dengan sangat mendalam, artinya melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis dicari informasi selengkapnya untuk tujuan pengumpulan data hasil penelitian. Alasan penulis melakukan penelitian dengan studi kasus karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji hipotesis, tetapi berusaha untuk menyimpulkan beberapa informasi yang berbeda tentang bagaimana cara atau kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian konflik sebagai

masalah sosial yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan observasi kita peroleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode-metode lainnya (Nasution, 1992:122).
- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2000:135). Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
- c. Studi Dokumentasi, yang diartikan sebagai teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dokumen yang berhubungan dengan objek yang di teliti, misalnya monografi desa, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Dalam hal ini penulis memerlukan dokumen/arsip desa dan arsip kecamatan yang memberikan gambaran tentang inti dari penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga tingkat validitas data yang nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti.

- d. Studi Literatur, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **F. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian ini, perlu kiranya memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Dalam penelitian ini, digunakan penjelasan istilah sebagai berikut:

- 1) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 1990:268). Jadi peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemimpin masyarakat dalam menyelesaikan konflik sebagai masalah sosial pada masyarakat Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan.
- 2) Tokoh masyarakat (pemimpin), adalah orang yang terkemuka dan berpengaruh dalam lingkungan masyarakat atau bisa dikatakan juga sebagai pemimpin yang tidak formal di lingkungan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Sanapiah Faisal, (1981:54) yakni:

“.....Tokoh-tokoh berpengaruh dapat dikatakan semacam pusat komando masyarakat; disitulah tempat masyarakat bertanya, tempat masyarakat meminta restu, tempat masyarakat memintakan kata sepakat, tempat masyarakat mengadu soal-soalnya, tempat masyarakat meminta petunjuk, tempat masyarakat melarikan diri“.

Yang dimaksud tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpengaruh, atau orang-orang yang dianggap mempunyai kharisma dan intelektual lebih dari masyarakat umumnya.

- 3) Konflik, adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing (Ronny Hanitijo, 1984:22).
- 4) Masalah sosial, adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Soerjono Soekanto, 1990:399). Masalah sosial dalam penelitian ini adalah persoalan mengenai macam-macam gejala kehidupan masyarakat, dalam hal ini konflik sebagai salah satu gejala masalah sosial.
- 5) Desa, ialah suatu tempat kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa menjadikan pemerintahan sendiri (Soetarjo Kartihadikoesoemo, 1965:3).

## **G. Populasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian baik berupa benda, manusia, peristiwa maupun gejala-gejala yang akan terjadi terjadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Ali, (1982:180)

bahwa: “Keseluruhan obyek penelitian baik dalam bentuk manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang akan terjadi disebut populasi atau universal“.

## 2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel atau sumber data di pilih secara purposif sampling. Sampel atau sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih oleh orang yang memiliki power dan otoritas pda situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peniliti akan mengumpulkan data. Dengan demikian setelah peneliti melakukan penelitian hingga mencapai data jenuh. Untuk mewakili populasi maka sumber data atau subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Aparat Desa Cibingbin
2. Tokoh masyarakat yang terdiri dari: Tokoh Agama, Tokoh Politik, Tokoh Pendidikan dan Ketua Karang Taruna.
3. Warga masyarakat Desa Cibingbin.